BAB II
TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan, memberdayakan, dan meningkatkan kemandirian masyarakat lapisan bawah, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka terhadap tekanan-tekanan yang ada di berbagai bidang dan sektor kehidupan (Cholisin, 2011). Konsep pemberdayaan masyarakat desa dapat diinterpretasikan melalui dua sudut pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai sebagai penempatan masyarakat dalam posisi yang lebih berdiri sendiri, bukan hanya sebagai penerima manfaat yang tergantung pada bantuan dari pihak luar, melainkan sebagai subyek yang bertindak secara mandiri. Mandiri di sini tidak berarti terlepas dari tanggung jawab negara, karena pemberian layanan publik tetap merupakan kewajiban negara. Sudut pandang kedua adalah dalam konteks pemberdayaan sebagai proses kolaboratif antara masyarakat dan pihak eksternal, seperti pemerintah atau organisasi non-pemerintah. Dalam sudut pandang ini, pemberdayaan melibatkan kerjasama antara berbagai pihak untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengakses sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan potensi mereka. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi kreatif mereka, mengelola lingkungan dan sumber daya mereka sendiri, menangani masalah secara mandiri, serta berperan aktif dalam proses politik di tingkat nasional. Mereka terlibat dalam upaya pembangunan dan tata kelola pemerintahan (Cholisin, 2011).

Proses pemberdayaan masyarakat merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan kondisi sosial, ekonomi, dan politiknya. Kemampuan ini menjadi krusial dalam upaya untuk meningkatkan posisinya dalam masyarakat. Dengan ata lain proses pemberdayaan adalah upaya

pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga masyarakat terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Ini bertujuan agar mereka memiliki kemampuan untuk meningkatkan posisi mereka dalam masyarakat atau menjadi anggota masyarakat yang lebih aktif. Masyarakat yang berdaya adalah mereka yang hidup dalam konsep masyarakat madani atau *civil society*. Ini mencerminkan suatu masyarakat yang yakin akan kemampuan anggotanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Masyarakat tersebut menyadari hak-hak dan kewajibannya dalam kehidupan bersama. Kondisi pemberdayaan tercapai ketika anggota masyarakat diberikan kesempatan untuk semakin mandiri Tila'ar (1997) dalam (Pratiwi, 2017).

Menurut Chambers dalam (Pratiwi, 2017), pemberdayaan juga mengacu pada kemampuan individu, terutama kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki kekuatan atau kapabilitas dalam beberapa aspek. Pertama, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga mereka memperoleh kebebasan, yang tidak hanya mencakup kebebasan berpendapat tetapi juga kebebasan dari penderitaan. Kebebasan ini dapat diciptakan oleh kelompok itu sendiri atau melalui fasilitas dari pemerintah. Kedua, kemampuan untuk mengakses sumber-sumber produktif yang memungkinkan peningkatan pendapatan dan perolehan barang serta jasa yang diperlukan. Ketiga, kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu bentuk pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial.

B. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan kemampuan dan kemandirian kepada mereka, terutama dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketertinggalan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan tercermin dari kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan yang bergizi, sandang yang layak, papan yang layak huni, akses layanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang berkualitas, serta akses transportasi yang terjangkau. Melalui pemberdayaan, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh dengan memperoleh akses yang lebih

baik terhadap sumber daya dan peluang. Sebaliknya, keterbelakangan mencakup aspek-aspek seperti produktivitas yang rendah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya akses terhadap tanah, terutama karena ketergantungan pada sektor pertanian yang masih dominan, dan melemahnya pasar lokal atau tradisional karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan internasional. Dengan kata lain, masalah keterbelakangan melibatkan aspek struktural, seperti kebijakan, dan aspek kultural, sesuai dengan konsep yang diungkapkan oleh Usman Sunyoto (2004) dalam (Cholisin, 2011). Sedangkan menurut Jamaludi dalam (Pratiwi, 2017), terdapat pandangan lain mengenai tujuan dari pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1) Mendukung percepatan pelaksanaan proyek-proyek pengembangan masyarakat pedesaan untuk mengatasi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, perumahan, jalan, dan usaha ekonomi produktif.
2) Mendorong kesadaran sosial dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan masyarakat pedesaan.
3) Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat lokal seperti PKK dan karang taruna untuk berperan aktif dalam proses pembangunan desa.
4) Mengembangkan institusi dan gerakan pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat pemerataan pembangunan, ekonomi masyarakat, dan stabilitas pembangunan.
5) Membangun kerjasama antar lembaga pemberdayaan masyarakat untuk menyelaraskan program-program pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
6) Membangun pusat dokumentasi dan informasi tentang gerakan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks ini, peningkatan pendidikan masyarakat menjadi prioritas dengan tujuan "mendidik masyarakat agar mampu belajar sendiri" atau "membantu masyarakat agar mampu memberikan bantuan kepada diri mereka sendiri." Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, swadaya, inovatif, dan berpikiran terbuka (Pratiwi, 2017).

C. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberikan kemampuan dan kemandirian kepada masyarakat, khususnya dalam mengatasi kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dikenali melalui indikator kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Keterbelakangan dapat mencakup rendahnya produktivitas, sumber daya manusia yang lemah, dan terbatasnya akses terhadap tanah, terutama dalam konteks pertanian, Usman Sunyoto (2004) dalam (Cholisin, 2011). Strategi atau kegiatan yang dapat diupayakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa pendekatan:

Strategi 1: Menciptakan Iklim, Memperkuat Daya, dan Melindungi

Dalam strategi ini memberdayakan masyarakat terfokus pada penciptaan suasana yang mendukung, penguatan potensi, dan perlindungan. Pendekatan ini mempertimbangkan tiga aspek utama: pertama, menciptakan lingkungan yang memungkinkan perkembangan potensi masyarakat; kedua, meningkatkan potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, termasuk peningkatan pendidikan, kesehatan, dan akses ke sumber-sumber kemajuan ekonomi; ketiga, memberikan perlindungan bagi yang lemah agar tidak semakin lemah dalam proses pemberdayaan.

1) Pertama, menciptakan suasana yang mendukung berarti mengakui potensi yang dimiliki setiap masyarakat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi tersebut berkembang.
2) Kedua, penguatan potensi masyarakat yang melibatkan peningkatan pendidikan, kesehatan, akses modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Fokus pada pembangunan prasarana dan sarana fisik dan sosial, seperti irigasi, jalan, listrik, sekolah, dan fasilitas kesehatan, dapat memberikan dukungan yang lebih baik terutama bagi masyarakat pada lapisan paling bawah yang keberdayaannya terbatas. Pemberdayaan tidak hanya melibatkan penguatan individu tetapi juga institusi dan nilai-nilai budaya. Memasukkan nilai-nilai budaya modern dan pembaharuan institusi-institusi sosial menjadi

bagian penting dari upaya pemberdayaan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lokal juga dianggap sebagai elemen kunci.

3) Ketiga, konsep memberdayakan juga mencakup perlindungan. Dalam konteks ini, perlindungan menjadi krusial untuk mencegah penguatan yang tidak seimbang dan eksploitasi. Penting untuk memastikan bahwa pemberdayaan tidak membuat masyarakat lebih tergantung pada bantuan, tetapi sebaliknya, tujuan akhirnya adalah memberdayakan masyarakat agar dapat memajukan diri secara mandiri menuju kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan.

Strategi 2: Program Pembangunan Pedesaan

Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pemerintah telah mengusulkan berbagai program pembangunan pedesaan, yang mencakup empat jenis utama yang diuraikan oleh Sunyoto Usman (2004) dalam (Cholisin, 2011). Program-program tersebut melibatkan: (1) pembangunan pertanian, (2) industrialisasi pedesaan, (3) pembangunan masyarakat desa terpadu, dan (4) strategi pusat pertumbuhan.

1) Program pertama dalam rangka pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani serta mengatasi kekurangan pangan di pedesaan. Selain itu, program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan rumah tangga serta memperkuat ekspor produk pertanian ke negara maju.
2) Program kedua, yaitu industrialisasi pedesaan, difokuskan pada pengembangan industri kecil dan kerajinan sebagai solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan kepemilikan lahan dan lapangan kerja yang semakin sempit di pedesaan.
3) Program ketiga, pembangunan masyarakat terpadu, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas hidup penduduk, dan kemandirian dengan fokus pada pembangunan pertanian, perluasan kesempatan kerja, intensifikasi tenaga kerja melalui industri kecil, partisipasi dalam pengambilan keputusan, pengembangan perkotaan yang mendukung pembangunan

pedesaan, dan pembangunan kelembagaan yang dapat mengkoordinasikan proyek multisektor.

4) Program keempat, yaitu strategi pusat pertumbuhan, bertujuan untuk menentukan jarak yang ideal antara pedesaan dan kota agar kota dapat berfungsi sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produksi. Salah satu langkah yang diusulkan adalah dengan membangun pasar di dekat desa untuk menampung hasil produksi desa dan memberikan informasi mengenai preferensi konsumen serta kemampuan produsen. Pusat pertumbuhan diupayakan agar tetap dekat secara sosial dengan desa sambil memiliki fungsi dan karakteristik yang serupa dengan kota.

D. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) menggarisbawahi pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat, dengan prinsip demokrasi dan partisipasi menjadi landasan untuk memperkuat potensi lokal. Masyarakat dilihat sebagai subjek yang aktif dalam proses pemberdayaan, bukan hanya sebagai objek. Mereka mengidentifikasi tiga tahapan pemberdayaan: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) dalam (Wahyuni, 2018).

1) Proses Penyadaran

Menurut Simongkir (1987) yang dikutip oleh Jumanti (2014) dalam (Ni'mah, 2019), kesadaran pada dasarnya merupakan refleksi dari cara berpikir, untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengubah pola pikir mereka. Kesadaran masyarakat merupakan hasil dari pola pikir yang dianut oleh kelompok tersebut. Teori Freire dalam (Ni'mah, 2019) juga menyatakan bahwa proses penyadaran dalam pemberdayaan masyarakat dimulai dengan musyawarah. Musyawarah dianggap sebagai langkah awal untuk menyadarkan masyarakat akan program-program yang akan dibicarakan, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembahasan tersebut. Selain itu, proses penyadaran juga dapat dipicu oleh interaksi dengan dunia luar. Menurut Suwarsono dan Budiman yang dikutip oleh Aziz Muslim (Ni'mah, 2019) perubahan dianggap sebagai

hasil dari interaksi masyarakat dengan lingkungan yang lebih maju, menekankan pentingnya interaksi dengan dunia yang berkembang untuk mendorong perubahan dalam masyarakat. Pada tahap penyadaran, masyarakat desa wisata sebagai subjek pemberdayaan diberi pemahaman bahwa setiap individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Masyarakat tersebut diberi motivasi untuk menjadi mandiri, dengan proses pemberdayaan dimulai dari diri mereka sendiri. Fasilitator hadir untuk membantu masyarakat, bukan sebagai pengarah utama, sehingga menciptakan iklim yang mendukung perkembangan potensi masyarakat. Menurut Notoatmojo (2007) dalam (Ni'mah, 2019) ada tiga indikator dalam kesadaran, diantaranya:

a) Pengetahuan

   Pengetahuan merupakan hasil dari proses mengetahui, yang terjadi setelah individu melakukan pengamatan terhadap suatu objek. Pengetahuan ini diperoleh melalui penggunaan berbagai indera seperti penglihatan, pendengaran, dan indera lainnya. Aspek-aspek pengetahuan meliputi pemahaman tentang objek yang diketahui, kemampuan menerapkan materi yang telah dipelajari dalam situasi nyata, kemampuan menganalisis objek, serta kemampuan mengevaluasi atau menilai objek tersebut.

b) Sikap

   Sikap adalah respons atau reaksi yang timbul secara internal dari seseorang terhadap rangsangan atau objek tertentu. Sikap melibatkan tindakan penerimaan di mana individu mau memperhatikan stimulus yang diberikan, serta respon di mana individu melakukan dan menyelesaikan tugas yang diberikan, menunjukkan bahwa ia menerima ide atau rangsangan tersebut. Ini menggambarkan bagaimana individu bereaksi secara internal terhadap suatu situasi atau objek.

c) Tindakan/Perilaku

   Perilaku melibatkan serangkaian tindakan yang mencakup beberapa aspek. Pertama, terdapat persepsi di mana individu mengenali dan memilih objek terkait dalam rangka mengambil tindakan. Kedua, terdapat respon di mana individu mampu melakukan tindakan sesuai dengan urutan yang tepat dan

sesuai dengan konteksnya. Ketiga, terdapat mekanisme di mana individu dapat melakukan tindakan secara otomatis setelah memperoleh pemahaman yang memadai. Keempat, terdapat adopsi yang merupakan tindakan yang baik dan telah dimodifikasi sesuai kebutuhan atau situasi tertentu. Ini menggambarkan serangkaian proses yang terlibat dalam perilaku individu, mulai dari pengenalan objek hingga tindakan yang dimodifikasi sesuai keadaan, Jamanti (2014) dalam (Ni'mah, 2019).

2) Proses Pengkapasitasan

Sulistiyani (2004) dalam (Ni'mah, 2019) menjelaskan bahwa proses pengkapasitasan merupakan transformasi dari pengetahuan dan keterampilan. Dalam tahap ini, masyarakat mengalami pembelajaran terkait pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan yang ada. Peningkatan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan mandiri bagi masyarakat. Kemandirian masyarakat tercermin dalam kemampuannya untuk mengambil inisiatif, menciptakan kreasi, dan berinovasi dalam lingkungannya. Proses pengkapasitasan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu individu, organisasi, dan nilai-nilai sistem. Pelaksanaan pengkapasitasan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti workshop, seminar, dan sejenisnya.

3) Proses Pendayaan

Proses pendayaan melibatkan pemberian kekuasaan, keterampilan, dan peluang kepada masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh mereka. Prinsip utamanya adalah memberikan keterampilan yang relevan dengan penerima manfaat. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan pendayaan adalah melalui sistem pinjaman modal. Meskipun masyarakat telah melalui proses penyadaran dan peningkatan kapasitas, penting untuk memberikan daya sesuai dengan kemampuan mereka dalam mengelola usaha Muslim (2012) dalam (Ni'mah, 2019). Pendayaan melibatkan pemberian daya, otoritas, atau peluang kepada masyarakat desa wisata untuk mencapai kemandirian. Pemberian daya ini

disesuaikan dengan kualitas kecakapan masing-masing individu, seperti pemberian kredit modal usaha sesuai dengan kemampuan mengelola usaha.

E. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Axinn, 1988 dalam (Haris, 2014) mengidentifikasi beberapa jenis pendekatan yang digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Beberapa tipe pendekatan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Pendekatan Komunitas: Menitikberatkan pada pengembangan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang memfokuskan pada kebutuhan dan sumber daya komunitas.
2) Pendekatan Umum: Mengacu pada pendekatan yang bersifat umum dan tidak terfokus pada aspek tertentu, melainkan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.
3) Pendekatan Proyek: Terfokus pada pelaksanaan proyek-proyek tertentu yang dapat meningkatkan kondisi masyarakat dan memberikan manfaat secara langsung.
4) Pendekatan Kerjasama: Menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam mencapai tujuan pemberdayaan.
5) Pendekatan Partisipatif: Memfokuskan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program pemberdayaan.
6) Pendekatan Pelatihan dan Kunjungan**:** Melibatkan kegiatan pelatihan dan kunjungan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
7) Pendekatan Lembaga Pendidikan**:** Menitikberatkan pada peran lembaga pendidikan dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat.
8) Pendekatan Pembangunan Sistem Usaha Tani**:** Berfokus pada pengembangan sistem usaha tani sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian.

Konsep pemberdayaan masyarakat menekankan bahwa masyarakat bukanlah objek dari proyek pembangunan, melainkan subjek dari upaya pembangunan

sendiri. Dalam konteks ini, pendekatan pemberdayaan masyarakat seharusnya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut (Sujarwo, 2021):

1) Terarah (*Targetted*): Pemberdayaan harus difokuskan pada mereka yang memerlukan, dengan program yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah dan kebutuhan mereka.
2) Partisipasi Masyarakat: Program harus melibatkan langsung atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Hal ini bertujuan agar bantuan yang diberikan efektif, sesuai dengan keinginan, kemampuan, dan kebutuhan masyarakat, sambil memberdayakan mereka melalui pengalaman merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkannya.
3) Pendekatan Kelompok: Menggunakan pendekatan kelompok karena penanganan masalah masyarakat miskin akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan secara kolektif. Kemitraan usaha antara kelompok yang memerlukan bantuan dengan kelompok yang lebih maju perlu ditingkatkan dan dipelihara secara saling menguntungkan.

Pada intinya, pemberdayaan memiliki dua elemen pokok, yaitu kemandirian dan partisipasi. Pemberdayaan masyarakat menjadi langkah awal dalam mencapai partisipasi aktif masyarakat/komunitas, terutama dalam pengambilan keputusan, untuk membantu mengembangkan kemandirian komunitas Nasdilan (2014) dalam (Sujarwo, 2021).

2.1.2 Konsep Desa Wisata

A. Pengertian Desa Wisata

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata diartikan sebagai serangkaian kegiatan wisata yang melibatkan berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Konsep kepariwisataan mencakup berbagai dimensi dan disiplin, muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan individu dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Pembangunan sektor pariwisata memegang peran penting dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomi, sektor pariwisata memberikan kontribusi melalui

devisa dari kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), aktivitas ekonomi wisatawan domestik, serta dampaknya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan komponen-komponennya. Dalam aspek sosial, pariwisata menjadi pendorong penyerapan tenaga kerja, apresiasi terhadap seni, tradisi, dan budaya nasional, serta penguatan identitas bangsa. Di bidang lingkungan, pariwisata dapat menjadi alat efektif untuk mempromosikan dan melestarikan kekayaan alam, serta mendukung pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional (Nugroho *et al.*, 2016).

Pengembangan sektor pariwisata dan komponen pendukungnya memiliki signifikansi dalam konteks integrasi nasional. Aktivitas ekonomi pariwisata dapat berkembang di berbagai wilayah dengan dukungan sektor-sektor pendukung, infrastruktur, dan sektor lainnya. Selain itu, sektor pariwisata tidak hanya mempertahankan keberagaman geografis nusantara, tetapi juga mengarah pada partisipasi masyarakat, efisiensi, dan peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui sektor pariwisata menciptakan hubungan positif antara warga negara dan pemerintah, di mana keduanya berusaha memelihara manfaat dari kerjasama yang terjalin (Nugroho, 2019). Dalam konteks pengembangan pariwisata, desa diharapkan untuk mengubah citranya menjadi ndestinasi wisata yang menarik. Transformasi ini melibatkan persiapan desa agar mampu memberikan pengalaman positif bagi wisatawan, termasuk kenyamanan dan kebahagiaan dalam menikmati kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan desa tersebut Nugroho, dalam (Nugroho, 2019).

Berdasarkan penjelasan dari Muljadi dalam (Itah Masitah, 2019) Desa wisata dapat didefinisikan sebagai destinasi pariwisata yang melibatkan seluruh komunitas desa dan sumber daya yang dimilikinya. Selain memberikan dampak positif pada perekonomian lokal, desa wisata juga berperan penting dalam upaya pelestarian lingkungan alam dan warisan budaya masyarakat. Aspek kebersamaan, solidaritas, dan nilai-nilai tradisional seperti gotong-royong menjadi bagian yang tak terpisahkan dari konsep desa wisata. Fandeli (2016) dalam (Itah Masitah, 2019) menyajikan definisi desa wisata dengan lebih komprehensif. Menurutnya, desa wisata merupakan sebuah kawasan pedesaan yang menampilkan keaslian dan

keunikan dari berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, tradisi, aktivitas sehari-hari, serta tata ruang desanya. Di samping itu, desa wisata juga memiliki potensi yang dapat dijadikan daya tarik bagi para wisatawan, seperti atraksi wisata, kuliner lokal, souvenir khas, fasilitas akomodasi, dan berbagai layanan wisata lainnya. Dengan demikian, desa wisata tidak hanya sekadar menawarkan destinasi wisata, tetapi juga menciptakan pengalaman autentik bagi pengunjung.

Desa wisata dapat dianggap sebagai entitas yang hidup mandiri dengan segala potensi yang dimilikinya, mampu menarik minat wisatawan tanpa melibatkan pihak investor eksternal. Sementara itu, Hadiwijoyo (2010) dalam (Itah Masitah, 2019) memberikan perspektif tambahan dengan menyatakan bahwa pengembangan desa wisata melibatkan berbagai kegiatan dan usaha untuk menarik minat wisatawan. Dalam upaya ini, diperlukan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung. Dengan konsep pengembangan desa wisata yang holistik, terdapat sinergi antara keberlanjutan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan aspek budaya dalam sebuah komunitas desa. Melalui pendekatan ini, desa wisata dapat menjadi model pembangunan yang berkelanjutan, mampu memberdayakan masyarakat lokal dan merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut (Itah Masitah, 2019).

B. Syarat Pariwisata

Menurut Dickman (1997) yang menggunakan konsep 5A dalam (Purwaningrum and Ahmad, 2021) menurutnya pariwisata tidak mungkin terjadi tanpa adanya tujuan yang menjadi fokus. Saat seseorang melakukan perjalanan, mereka melakukan itu dengan tujuan tertentu yang dapat memberikan pengalaman yang memuaskan dan memenuhi kebutuhan mereka. Pentingnya 5A dalam konteks ini adalah sebagai berikut:

1) Atraksi (Daya Tarik), merupakan alasan utama bagi orang-orang untuk mengunjungi suatu tempat. Daya tarik dapat dibagi menjadi empat kategori, termasuk keindahan alam, atraksi buatan manusia, warisan budaya, dan interaksi sosial dengan penduduk lokal..

2) Aktivitas, setiap individu memiliki preferensi aktivitas yang berbeda saat berlibur, mulai dari aktivitas yang aktif hingga yang pasif. Destinasi pariwisata biasanya menawarkan berbagai macam aktivitas untuk memenuhi kebutuhan berlibur wisatawan.
3) Aksesibilitas, merujuk pada kemudahan akses menuju dan di dalam destinasi, termasuk infrastruktur transportasi dan sarana transportasi. Wisatawan mengharapkan perjalanan yang nyaman dan aman.
4) Akomodasi, sangat penting bagi setiap wisatawan untuk memilih tempat singgah yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan mereka selama berlibur. Pilihan akomodasi yang beragam dari penginapan hingga hotel bintang lima sangatlah penting.
5) Amenitas, fasilitas yang tersedia di destinasi pariwisata juga sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keinginan wisatawan, termasuk makanan dan minuman, transportasi lokal, dan fasilitas kesehatan. Pasokan listrik dan air yang memadai juga merupakan hal yang krusial.

C. Pengembangan Desa Wisata

Menurut Nuryanti dalam (Sidiq and Resnawaty, 2017), desa wisata dapat didefinisikan sebagai bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang melekat pada tata cara dan tradisi yang berlaku. Komponen utama dalam desa wisata, menurutnya, melibatkan akomodasi, yang mencakup sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat atau unit-unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, dan atraksi, yang mencakup seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta latar belakang lokasi desa yang memungkinkan interaksi berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif. Contohnya, kegiatan kursus tari, bahasa, lukis, dan aspek-aspek spesifik lainnya menjadi bagian dari atraksi tersebut.

Dalam konteks pengembangan desa wisata, Pearce dalam (Sidiq and Resnawaty, 2017) menjelaskan pengembangan desa wisata merupakan suatu proses yang berfokus pada upaya meningkatkan atau mengembangkan desa wisata itu sendiri. Ini mencakup peningkatan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan

para wisatawan. Masyarakat lokal memegang peran penting dalam proses ini karena kekayaan sumber daya dan keunikan tradisi serta budaya mereka menjadi faktor utama yang mendorong aktivitas desa wisata. Selain itu, interaksi antara masyarakat lokal dan objek wisata menciptakan sistem ekologi yang saling terkait. Keberhasilan pengembangan desa wisata sangat tergantung pada dukungan dan penerimaan yang diberikan oleh masyarakat lokal. Mereka bukan hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam semua aspek pengembangan desa wisata, mulai dari perencanaan hingga implementasi. (Sidiq and Resnawaty, 2017).

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dianggap sebagai aspek yang sangat krusial, berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan mereka. Partisipasi yang autentik akan melibatkan masyarakat dalam seluruh rangkaian pengembangan, mulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pengawasan program pembangunan desa wisata. Tingkat keterlibatan masyarakat ini dipengaruhi oleh sejauh mana kemauan, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi. Melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan desa wisata memiliki dampak positif, karena dapat mendorong partisipasi aktif mereka dalam pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan. Berdasarkan konsep ini, dapat dihasilkan suatu model pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat (Sidiq and Resnawaty, 2017).

Sebuah desa dapat dianggap layak dikembangkan sebagai desa wisata apabila memenuhi kriteria dan faktor-faktor pendukung berikut ini: Pertama, desa tersebut harus memiliki potensi produk atau daya tarik unik dan khas yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Potensi ini dapat berupa keindahan lingkungan alam maupun keberagaman kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Kedua, desa wisata perlu memiliki dukungan sumber daya manusia (SDM) lokal yang memadai untuk mengelola dan mendukung keberlanjutan desa wisata. Ketiga, faktor peluang akses terhadap pasar wisata juga menjadi kriteria penting, karena kesiapan desa sebagai destinasi wisata menjadi tidak efektif tanpa ketersediaan akses untuk berinteraksi dengan pasar atau wisatawan. Keempat,

potensi SDM lokal yang mendukung peluang akses terhadap pasar wisatawan juga perlu diperhatikan. Kelima, desa harus memiliki area yang dapat dikembangkan untuk fasilitas pendukung desa wisata, termasuk tempat tinggal sementara (*home stay*), area pelayanan umum, area kesenian, dan lain sebagainya, sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata DIY tahun 2014 dalam (Wahyuni, 2018).

Berdasarkan evolusi dan perkembangannya, desa wisata dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yang dijelaskan oleh Victoria br. Simanungkalit dkk dalam (Wahyuni, 2018).

1) Desa Wisata Embrio: Merupakan desa yang memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata. Pada tahap ini, sudah terlihat adanya inisiatif dari masyarakat untuk mengelola potensi tersebut menjadi destinasi wisata.
2) Desa Wisata Berkembang: Desa dalam kategori ini merupakan kelanjutan dari desa wisata embrio yang sudah mulai dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa secara swadaya. Masyarakat telah aktif melaksanakan kegiatan promosi, dan wisatawan sudah menunjukkan minat untuk berkunjung.
3) Desa Wisata Maju: Merupakan desa wisata yang telah mencapai tingkat perkembangan yang lebih maju. Desa ini ditandai dengan kunjungan wisatawan yang berlangsung secara kontinu, serta dikelola secara profesional dengan pembentukan forum pengelola seperti koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa wisata kategori ini telah berhasil melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran dengan baik.

Pada dasarnya, pengembangan desa wisata melibatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan tradisi seni budaya serta kearifan lokal setempat, sambil tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitarnya (Perdes No. 5, 2014). Proses pengembangan desa wisata mencakup aspek-aspek berikut:

1) Industri Pariwisata: Pengembangan sektor industri pariwisata sebagai bagian integral dari desa wisata untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal.
2) Destinasi Pariwisata: Peningkatan dan pengelolaan destinasi pariwisata yang mencerminkan kearifan lokal dan daya tarik khas desa, sehingga dapat menarik kunjungan wisatawan.
3) Kelembagaan Kepariwisataan: Pembentukan kelembagaan kepariwisataan yang efektif untuk mengelola dan mengkoordinasikan berbagai aspek kepariwisataan di desa tersebut.
4) Promosi dan Pemasaran: Upaya promosi dan pemasaran untuk meningkatkan visibilitas desa wisata, menarik minat wisatawan, dan mengoptimalkan potensi pariwisata yang dimiliki.

Seringkali, pembangunan desa masih mengikuti konsep "membangun desa," di mana faktor eksternal memegang peranan penting dalam menentukan arah pembangunan desa. Di mana desa mengandalkan bantuan luar, risiko tergantung pada asisten eksternal menjadi tinggi. Sebaliknya, prinsip "desa membangun" menegaskan peran masyarakat sebagai motor penggerak dalam pembangunan desa yang berkelanjutan dan mandiri. Dalam konteks pariwisata, pembangunan bersama masyarakat mengutamakan kepentingan jangka panjang penduduk lokal. Ini melibatkan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, dan potensi sumber daya secara terencana dan holistik. Dalam proses ini, partisipasi aktif masyarakat setempat menjadi kunci, karena merekalah yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur wisata. Diharapkan, melalui keterlibatan ini, masyarakat bisa merasakan manfaat ekonomi yang langsung dari pengembangan pariwisata di desa mereka (Pratiwi, 2017).

D. Tujuan Desa Wisata

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pembangunan pariwisata khususnya desa wisata memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi: Pariwisata menjadi salah satu sektor yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas wisatawan, investasi, dan pendapatan daerah.

2) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat: Dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pariwisata, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui peluang kerja dan pengembangan usaha.
3) Menghapus Kemiskinan: Pariwisata dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
4) Mengatasi Pengangguran: Dengan adanya industri pariwisata yang berkembang, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut.
5) Melestarikan alam dan Lingkungan Hidup: Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan harus memperhatikan pelestarian alam dan lingkungan hidup agar potensi pariwisata dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
6) Memajukan Kebudayaan: Pariwisata dapat menjadi sarana untuk mempromosikan dan melestarikan kebudayaan lokal, serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya daerah.
7) Mengangkat Citra Bangsa: Pengembangan pariwisata yang berhasil dapat meningkatkan citra positif suatu negara di mata dunia internasional.
8) Memupuk Rasa Cinta Tanah Air: Melalui pariwisata, masyarakat dapat lebih mencintai dan menghargai keindahan dan keberagaman budaya serta alam yang dimiliki oleh tanah airnya.
9) Memperkukuh Jati Diri dan Kesatuan Bangsa: Pariwisata dapat menjadi sarana untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dengan memperkenalkan kekayaan budaya dan alam yang dimiliki oleh berbagai etnis dan daerah di Indonesia.

Dalam konteks pembangunan desa wisata, tujuan-tujuan tersebut diwujudkan dengan memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesadaran akan potensi ekonomi pariwisata, memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata, membangun sikap positif sebagai tuan rumah, dan meningkatkan penjualan produk lokal dengan strategi branding dan manajemen yang kuat.

E. Jenis-Jenis Desa Wisata

Jenis-jenis desa wisata berdasarkan karakteristik sumber daya dan keunikan yang dimilikinya dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1) Desa wisata yang menitikberatkan pada keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik utama, terletak di wilayah pedesaan dengan keistimewaan berada di daerah pegunungan, sungai, pantai, dan ciri khas alam lainnya.
2) Desa wisata yang mengandalkan keunikan sumber daya budaya lokal, berlokasi di wilayah pedesaan dengan keistimewaan berbagai tradisi adat dan kehidupan masyarakat pedesaan.
3) Desa wisata yang menggabungkan keunikan sumber daya budaya dan alam sebagai daya tarik utama, ditemukan di wilayah pedesaan dengan daya tarik yang merupakan perpaduan kuat antara kekayaan budaya dan alam.
4) Desa wisata yang menarik wisatawan dengan keunikan aktivitas ekonomi kreatif sebagai daya tarik utama, terletak di wilayah pedesaan dengan kegiatan ekonomi kreatif yang berkembang, seperti industri rumah tangga, kerajinan, dan kesenian khas lokal (Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014) dalam (Ni'mah, 2019).

F. Syarat-Syarat Pembentukan Desa Wisata

Desa-desa yang dapat dijadikan sebagai program desa wisata harus memberikan contoh yang baik bagi desa-desa lainnya. Untuk menetapkan suatu desa sebagai desa wisata, beberapa persyaratan harus dipenuhi, termasuk:

1) Aksesibilitas yang baik agar mudah dijangkau oleh wisatawan menggunakan berbagai jenis transportasi.
2) Memiliki obyek menarik seperti alam, seni budaya, cerita legenda, makanan lokal, dan lain sebagainya yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata.
3) Dukungan tinggi dari masyarakat dan aparat desa terhadap program desa wisata serta para wisatawan yang berkunjung.
4) Keamanan di desa tersebut terjamin.
5) Tersedia akomodasi, layanan telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
6) Beriklim sejuk.

7) Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat secara luas.

G. Dampak Desa Wisata

Dampak ekonomi dari pengembangan pariwisata dapat memberikan efek positif dan negatif terhadap lingkungan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Dampak tersebut melibatkan perubahan dalam sektor pekerjaan, tingkat pendapatan, pola pembagian kerja, serta peluang kerja dan usaha. Menurut Pitana (2009) dalam (Surahman, Sudiarta and Suwena, 2020), dampak pariwisata terhadap kondisi ekonomi dapat dikategorikan dalam tujuh aspek yang melibatkan penerimaan devisa, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, distribusi manfaat atau keuntungan, kepemilikan dan kontrol ekonomi masyarakat, dampak terhadap pembangunan secara umum, dan dampak terhadap pendapatan pemerintah..

Keberadaan desa wisata memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya, yang antara lain mencakup perubahan penggunaan lahan. Proses perkembangan pariwisata seringkali mengakibatkan perubahan dalam pemanfaatan lahan, seperti perluasan kawasan terbangun. Dampak ekonomi juga menjadi aspek penting, di mana sektor ekonomi dapat menjadi indikator perkembangan daerah wisata. Dampak ini meliputi peningkatan kesempatan berusaha, peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, serta penerimaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, terdapat pengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar, di mana kedatangan wisatawan dapat memicu perubahan sikap sebagai respons terhadap lingkungan sekitarnya Pamungkas (2015) dalam (Ni'mah, 2019). Berdasarkan pasal 4 Undang-undang nomor 10 tahun 2009 menguraikan beberapa hal mengenai pembangunan pariwisata, pembangunan tersebut bertujuan untuk:

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3) Menghapus kemiskinan
4) Mengatasi pengangguran
5) Melestarikan alam, lingkungan hidup
6) Memajukan kebudayaan

7) Mengangkat citra bangsa
8) Memupuk rasa cinta tanah air
9) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, Edwin (2015) dalam (Ni'mah, 2019).

Desa wisata dirancang untuk memberdayakan masyarakat agar dapat menjadi aktor utama dalam mengoptimalkan potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah mereka, serta menjadi tuan rumah yang ramah bagi para wisatawan. Selain itu, desa wisata memiliki tujuan lain, antara lain:

1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi ekonomi pariwisata: Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami peluang ekonomi yang dapat dihasilkan dari kegiatan pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
2) Mempertegas peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan: Desa wisata bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat sebagai subjek penting dalam pengembangan pariwisata, serta untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan kualitas pariwisata di daerah tersebut.
3) Membangun sikap positif masyarakat sebagai tuan rumah: Desa wisata ingin menumbuhkan sikap positif masyarakat sebagai tuan rumah yang ramah, dengan mewujudkan nilai-nilai Sapta Pesona, sehingga dapat mendukung pertumbuhan pariwisata di daerah tersebut dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
4) Menjadi wadah kesadaran potensi wisata dan implementasi Sapta Pesona: Desa wisata berperan sebagai wadah langsung bagi kesadaran akan potensi wisata dan penerapan nilai-nilai Sapta Pesona di lingkungan destinasi wisata, serta sebagai mitra yang baik bagi pemerintah dalam upaya pengembangan pariwisata.
5) Mendorong peningkatan penjualan produk lokal: Desa wisata berusaha untuk meningkatkan penjualan produk lokal dengan memberikan akses yang lebih baik bagi warga untuk memasarkan produk mereka ke luar daerah atau bahkan

ke luar negeri. Hal ini juga membutuhkan branding yang kuat dari desa serta sumber daya manusia yang mampu mengelola penjualan dengan baik.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan atau mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul "Strategi Pemberdayaan Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis) adalah:

a) Penelitian tentang pemberdayaan ini pernah dilakukan oleh Hesty Pratiwi pada tahun 2017 dalam skripsipnya yang berjudul "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Mandiri di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang". Hasil dari penelitian menunjukan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat di Desa Wanurejo melalui desa wisata mandiri, terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu pelatihan, promosi, dan kerjasama. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan potensi seni, budaya, dan sumber daya alam desa tersebut. Faktor pendorong, seperti lokasi yang dekat dengan Candi Borobudur dan keberlanjutan kelompok seni, mendukung pelaksanaan strategi, meskipun dihadapi oleh faktor penghambat, seperti praktik mafia pariwisata dan dominasi Candi Borobudur sebagai destinasi utama dalam pariwisata Yogyakarta.
b) Penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata juga pernah dilakukan oleh Septi Amelia pada tahun 2021 pada skripsinya yang berjudul "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Ekowisata Di Desa Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat". Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi pelaksanaan pemberdayaan melalui desa ekowisata di Desa Pahmungan melibatkan tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Program dimulai dengan penyuluhan dan pelatihan oleh Dinas Pariwisata, diikuti dengan memberikan otoritas pengelolaan ekowisata sepenuhnya kepada masyarakat. Strategi ini membuka peluang partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan ekowisata. Meskipun evaluasi formal tidak dilakukan, masyarakat mulai merasakan manfaat dari ekowisata, tidak hanya dari hasil

damar tetapi juga dari potensi sumberdaya lain di Desa Pahmungan. Perlu adanya program pemberdayaan lanjutan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata.

c) Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata juga dilakukan oleh Dinar Wahyuni pada tahun 2017 dengan judul artikel "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul". Hasil dari penelian ini menunjukan Desa Wisata Nglanggeran menerapkan tiga strategi pemberdayaan masyarakat: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi oleh Karang Taruna Putra Bukit Mandiri untuk mengenalkan potensi desa sebagai destinasi wisata. Pengkapasitasan dilakukan dengan pelatihan pengelola desa wisata oleh berbagai pihak, seperti Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata, BUMN, swasta, dan LSM, yang kemudian dibentuk dalam organisasi Pokdarwis Nglanggeran. Masyarakat yang telah teredukasi diberdayakan melalui dukungan dana pembangunan dari instansi seperti Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan Pertamina. Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran membawa dampak positif terhadap penurunan tingkat migrasi dan transformasi mata pencaharian menuju sektor pariwisata.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian pustaka, penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata, faktor pendorong dan penghambat proses pemberdayaan, dan dampak setelah adanya proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis. Dalam konteks ini, peran serta masyarakat dalam pembangunan desa menjadi kunci untuk mencapai kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat, terutama yang berorientasi pada pemanfaatan potensi lokal, memiliki dampak signifikan secara sosial dan dalam konteks organisasi kemasyarakatan. Masyarakat diajak untuk berpikir aktif dan kreatif terhadap lingkungan sekitar sebagai peluang untuk menghasilkan keuntungan.

Pemberdayaan melalui desa wisata diharapkan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi. Selain memberikan manfaat ekonomi, desa wisata juga diharapkan dapat berperan dalam pelestarian budaya lokal dan lingkungan. Desa Sukamaju sebagai desa yang mengembangkan wisata masih menghadapi kendala dan permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata seperti ketidakmerataan penerima manfaat dari pengembangan desa wisata masih perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mencapai tujuan dengan memanfaatkan potensi wisata yang ada serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

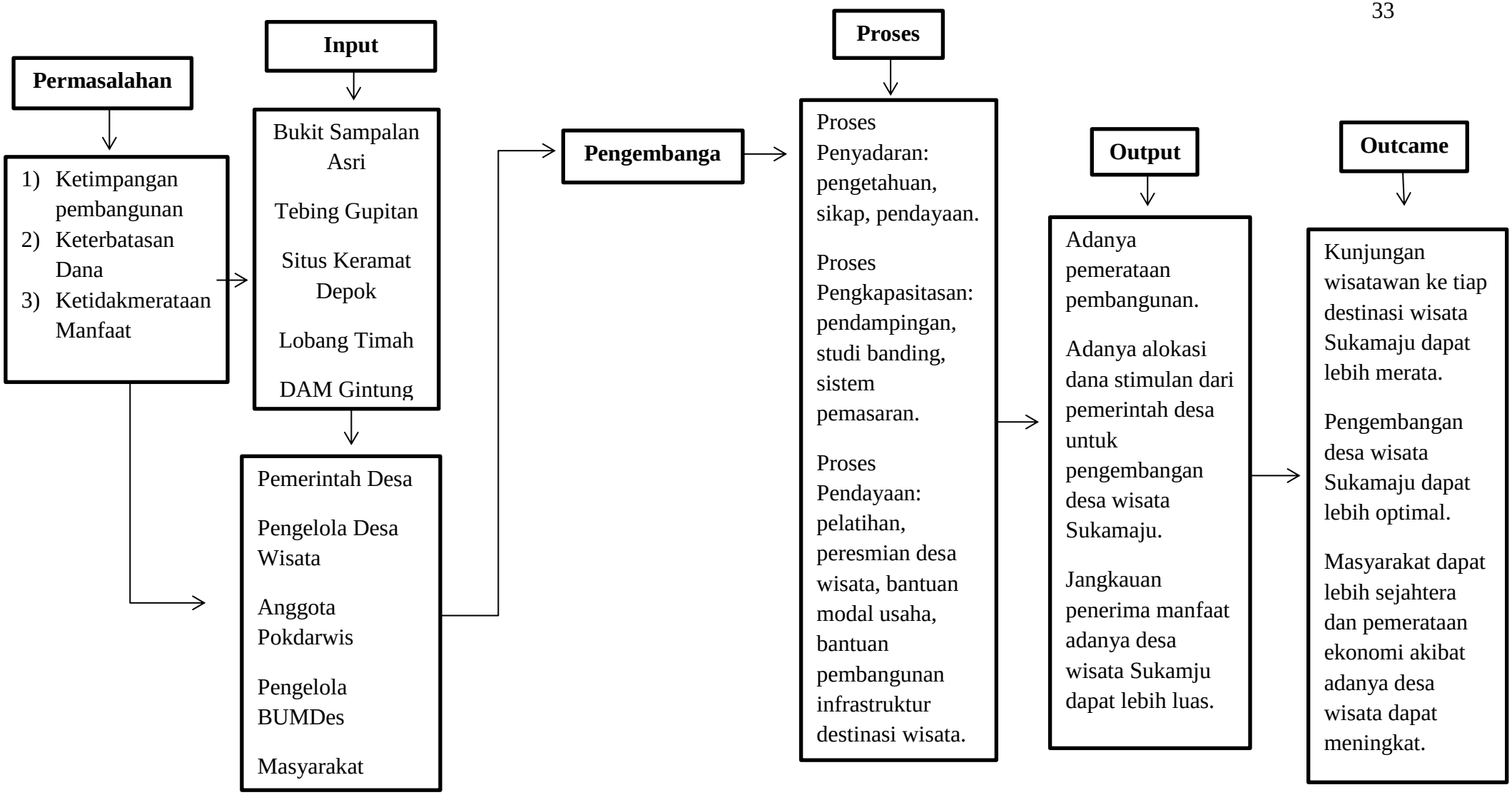

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan yang dapat mendukung penelitian ini yaitu bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Sukamaju?.